



# LAPORAN KEUANGAN AUDITED

SEMESTER II UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG**

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMSTER II TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED**

Polbangtan Yogyakarta  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



Jl. Kusumanegara No.2

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Polbangtan Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Polbangtan Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 8 Mei 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
Dr. Bambang Sudarmanto, SPt., MP  
NIP. 196705091996031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 8 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Bambang Sudarmanto, SPt., MP

NIP. 196705091996031002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp85.062.856,00 atau mencapai 162% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp52.600.000,00

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp186.033.250,00 atau mencapai 207% dari alokasi anggaran sebesar Rp69.000.000,00

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.381.949.070.364,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.382.629.241.936,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp26.098.820,00; dan Rp1.381.922.971.544,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.263.824,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp28.796.905.624,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-28.698.641.800,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp87.769.426,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-28.610.872.374,00

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.383.362.119.094,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-28.610.872.374,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp21.171.724.824,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.381.922.971.544,00.

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**POLBANGTAN YOGYAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	69.000.000,00	186.033.250,00	270	85.062.856,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>69.000.000,00</b>	<b>186.033.250,00</b>	<b>270</b>	<b>85.062.856,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	6.261.570.000,00	6.187.354.484,00	99	6.207.461.516,00
Belanja Barang	B.4.	21.340.786.000,00	21.170.403.590,00	99	26.377.208.647,00
Belanja Modal	B.5.	00	00	00	00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>27.602.356.000,00</b>	<b>27.357.758.074,00</b>	<b>99</b>	<b>32.584.670.163,00</b>

## II. NERACA

**POLBANGTAN YOGYAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	0,00	0,00
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	1.365.303.295.998,00	1.365.303.295.998,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	19.102.318.167,00	19.102.318.167,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	37.905.819.266,00	37.905.819.266,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.547.901.080,00	1.547.901.080,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	1.175.522.860,00	1.175.522.860,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-43.085.787.007,00	-41.649.965.726,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.381.949.070.364,00</b>	<b>1.383.384.891.645,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.3.1.	0,00	379.202.645,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	0,00	(379.202.645,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>			<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.381.949.070.364,00</b>	<b>1.383.384.891.645,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	26.098.820,00	22.772.551,00
Utang yang Belum Ditagihkan		0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN		0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>26.098.820,00</b>	<b>22.772.551,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>26.098.820,00</b>	<b>22.772.551,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5.	1.381.922.971.544,00	1.384.795.990.975,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>1.381.922.971.544,00</b>	<b>1.384.795.990.975,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>1.381.949.070.364,00</b>	<b>1.384.801.425.319,00</b>

## III. LAPORAN OPERASIONAL

**POLBANGTAN YOGYAKARTA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	96.263.824,00	79.851.499,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>96.263.824,00</b>	<b>79.851.499,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	6.188.388.284,00	6.203.091.049,00
Beban Persediaan	D.3.	10.000.000,00	57.505.148,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	13.516.699.872,00	15.587.084.555,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.318.136.383,00	1.481.356.287,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	5.577.859.804,00	9.250.649.579,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	750.000.000,00	30.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.435.821.281,00	1.658.585.153,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>28.796.905.624,00</b>	<b>34.268.271.771,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-20.698.641.800,00</b>	<b>-34.188.420.272,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	3.909.090,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	83.860.336,00	5.211.357,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>87.769.426,00</b>	<b>5.211.357,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-28.610.872.374,00</b>	<b>-34.183.208.915,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**POLBANGTAN YOGYAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	1.383.362.119.094,00	1.384.795.990.975,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-28.610.872.374,00	-34.183.208.915,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	0,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	27.171.724.824,00	32.749.337.034,00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	-1.439.147.550,00	-1.433.871.88100
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>1.381.922.971.544,00</b>	<b>1.383.362.119.094,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Polbangtan Yogyakarta

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang Kampus Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, Program, Anggaran dan kerjasama pendidikan
2. Pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian
3. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni
6. Pengelolaan administrasi umum
7. Pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perustakaan dan asrama
8. Pembinaan Civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan
9. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
10. Pelaksanaan sistem pengawasan internal
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

#### **VISI :**

“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani “.

#### **MISI :**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan Sektor Pertanian;
3. Menyelenggarakan nilai kejujuran sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;
4. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
5. Menjalin kemitraan dan jejaring kerja sama pendidikan; dan
6. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan

**TUJUAN :**

Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri dan berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan serta berjiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Polbangtan Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

**A.3. Basis Akuntansi**

Polbangtan Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Polbangtan Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Polbangtan Yogyakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Polbangtan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Polbangtan Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	69.000.000,00	69.600.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>69.600.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.679.501.000,00	6.164.839.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,00	65.923.000,00
Belanja Lembur	244.263.000,00	30.808.000,00
Belanja Barang Operasional	1.513.676.000,00	1.657.045.000,00
Belanja Barang Non Operasional	13.425.151.000,00	10.552.430.000,00
Belanja Barang Persediaan	10.000.000,00	10.000.000,00
Belanja Jasa	1.573.680.000,00	1.405.715.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.500.563.000,00	1.332.512.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.669.400.000,00	5.633.084.000,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	750.000.000,00	750.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.366.234.000,00</b>	<b>27.602.356.000,00</b>

**B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp186.033.250,00 atau mencapai 270% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp69.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

## Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023			
	Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak	69.000.000,00			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan			69.487.600,00	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			3.909.090,00	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			27.776.224,00	
	69.000.000,00		101.172.914,00	146.63%
Pendapatan Lain-Lain				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			4.500.000,00	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang LAlu			79.360.336,00	
Pendapatan Anggaran Lain-lain			1.000.000,00	
			84.860.336,00	
<b>Jumlah</b>	<b>69.000.000,00</b>		<b>186.033.250,00</b>	<b>269.617%</b>

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 119% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Polbangtan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian : untuk kebun Celeban komoditas jagung pipil, sukun, ubi kayu, pisang, papaya, cabai ; kebun Morangan ; Padi/gabah ; kebun Banyak ; papaya, serai, oyong/gambas, paria, tomat, cabai ; Sempu : Serai ; Karang Sari : jagung pipil dan Cabai.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas dari bulan Januari sd Desember tahun 2023.
3. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu : pengembalian belanja pegawai an. Galuh HEA dari bulan Maret sd Desember 2022
4. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu : Pengembalian uang kegiatan di TA 2022
5. Pendapatan Anggaran Lain-lain berupa hasil setoran pemotongan kertas.

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	69.487.600,00	52.650.000,00	32
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.909.090,00	0,00	100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	27.776.224,00	27.201.499,00	2
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Anggaran Lain -Lain	1.000.000,00	000	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.500.000,00	27,00	166
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	79.360.336,00	5.211.330,00	1423
<b>Jumlah</b>	<b>186.033.250,00</b>	<b>85.062.856,00</b>	<b>119</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp27.357.758.074,00 atau 99.6% dari anggaran belanja sebesar Rp27.602.356,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	6.261.570.000,00	6.189.789.914,00	9885
Belanja Barang	21.340.786.000,00	21.303.094.242,00	9982
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>27.602.356.000,00</b>	<b>27.492.884.156,00</b>	<b>9960</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>135.126.082,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>27.602.356.000,00</b>	<b>27.357.758.074,00</b>	<b>9911</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Penurunan -17% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp.2.435.430,- untuk tunjangan fungsional an. Fitri Ratna Asih bulan Agustus 2023 Rp. 375.000,- dan tunjangan jabatan fungsional an. Galuh dari bulan Januari sd April 2023 dan gaji 13 Rp. 1.875.000,- dan Pengembalian Tunjangan Fungsional Umum an. Sari Megawati Rp.185.000,-
2. Pengembalian belanja barang sebesar Rp.135.126.082,- yaitu biaya pelatihan Applied Approach (AA) pelaksanaan Penjaminan Mutu, kegiatan kegiatan Family Getering, Kelebihan pembayarn kuota pulsa internet bulan maret dan April, Pengembalian keg. Pegawai Building.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	6.189.789.914,00	6.208.387.462,00	0
Belanja Barang	21.303.094.242,00	2.638.569.4918,00	-19
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	27.492.884.156,00	32.594.082.380,00	-16
Pengembalian Belanja	135.126.082,00	9.412.217,00	1336
<b>Total Belanja</b>	<b>27.357.758.074,00</b>	<b>32.584.670.163,00</b>	<b>-16</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.187.354.484,00,- dan Rp6.207.461.516.00,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan dengan nilai sebesar -0% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya 3 pegawai PPPK : 2 Asisten Ahi, 1 PLP dan 3 pegawai mutasi

## Data Kepegawaian Polbangtan Yogyakarta – Magelang Kampus Yogyakarta

KODE ESELON I	NAMA SATKER	UPT				JUMLAH
		FUNGSIONAL TERTENTU	PPPK	PELAKSANA	CPNS	
018	Polbangtan Yogyakarta	46	3	40	0	90
	<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.107.786.598,00	6.109.773.462,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	52.963.316,00	0,00	100
Belanja Lembur	29.040.000,00	98.614.000,00	-71
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>6.189.789.914,00</b>	<b>6.208.387.462,00</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>2.435.430,00</b>	<b>925.946,00</b>	<b>163</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.187.354.484,00</b>	<b>6.207.461.516,00</b>	<b>0</b>

## B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.170.403.590,00 dan Rp26.377.208.647,00 Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar -20% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Volume Kegiatan di tahun 2022 lebih banyak dibanding tahun 2023

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.618.431.787,00	1.760.662.825,00	-8
Belanja Barang Non Operasional	10.528.490.144,00	12.074.267.982,00	-13
Belanja Barang Persediaan	10.000.000,00	22.783.700,00	-56
Belanja Jasa	1.388.829.229,00	1.733.750.074,00	-20
Belanja Pemeliharaan	1.321.140.849,00	1.511.120.860,00	-13
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9.427.324.000	9.253.109.477,00	-2

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	750.000.000,00	30.000.000,00	2400
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>21.303.094.242,00</b>	<b>26.385.694.918,00</b>	<b>-19</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>132.690.652,00</b>	<b>8.486.271,00</b>	<b>1464</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>21.170.403.590,00</b>	<b>26.377.208.647,00</b>	<b>-20</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Uang Tunai di Brangkas	0,00
Saldo di Bank	0,00
Kwitansi UP	0,00
Uang Muka	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

#### C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.678.248,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	0,00	7.678.248,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678.248,00</b>

### C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Terdapat Piutang Bukan Pajak senilai Rp0,00 yang merupakan potongan sewa rumah dinas bulan Oktober 2023 melalui potongan SPM dan Potongan SPM Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu pembulatan dari gaji

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.365.303.295.998,00 dan Rp1.365.303.295.998,00.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.102.318.167,00 dan Rp19.102.318.167,00

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp37.905.819.266,00 dan Rp37.905.819.266,00.

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.547.901.080,00 dan Rp1.547.901.080,00.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.175.522.860,00 dan Rp1.175.522.860,00.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-43.085.787.007,00 dan Rp-41.649.965.726,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

## Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	19.102.318.167,00	-17.594.461.090,00	1.876.046.344,00
2.	Gedung dan Bangunan	37.905.819.266,00	-24.497.055.268,00	13.408.763.998,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.547.901.080,00	-974.195.649,00	573.705.431,00
4.	Aset Tetap Lainnya	1.175.522.860,00	-20.075.000,00	1.155.447.860,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>59.731.561.373,00</b>	<b>-43.085.787.007,00</b>	<b>17.013.963.633,00</b>

**C.3. ASET LAINNYA****C.3.1. Aset Lain-lain**

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.379.202.645,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Polbangtan Yogyakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain di tahun 2023 sudah dilakukan penghapusan tinggal menunggu SK Penghapusan di aplikasi sudah di lakukan usul hapus

**C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Polbangtan Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-43.085.787.007,00 dan Rp-41.649.965.726,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>59.731.561.373,00</b>	<b>-43.085.787.007,00</b>	<b>17.013.963.633,00</b>

#### C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

##### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.098.820,00 dan Rp22.772.551,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Polbangtan Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang kepada Pihak Ketiga	26.098.820,00	22.772.551,00
Utang yang belum ditagihkan	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan table diatas pada periode laporan per 31 Desember 2023 dijelaskan sebagai berikut :

1. Utang kepada pihak ketiga senilai Rp.26.098.820,00 adalah :

No	KETERANGAN	RUPIAH
1	Belanja Barang Langganan Listrik	24.819.527
2	Belanja Barang Langganan Telepon	137.493
3	Belanja Barang Langganan Air	108.000
4	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar/Kekurangan Gaji Bulan Desember	266.600
5.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS/Tunjangan Fungsional PNS	767.200
	Jumlah Total	26.098.820

#### C.5. EKUITAS

##### C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.381.922.971.544.00,- dan Rp1.383.362.119.094,00,- Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98.263.824,00.- dan Rp79.851.499,00.- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	69.487.600,00	52.650.000,00	32
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	27.776.244,00	27.201.499,00	2
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>98.263.824,00</b>	<b>42.504.353,00</b>	<b>131%</b>

Realisasi PNBP berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp186.033.250,00 sedangkan realisasi berdasarkan LO sebesar Rp98.263.824,00. Atas realisasi tersebut terdapat selisih realisasi antara laporan sebesar Rp87.769.426,00. Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan yang diakibatkan adanya perbedaan periode pengakuan pendapatan kas dan Akrua. Pendapatan Kas (LRA) diakui pada saat kas diterima, sedangkan pendapatan akrua (LO) diakui pada saat satker memiliki hak atas pendapatan tersebut.

Perbedaan yang diakibatkan cara penyajian saldo di masing-masing laporan, pada LRA disajikan untuk dua digit akun pendapatan yaitu PNBP sedangkan pada LO disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi (4 digit).

Adanya jurnal balik pendapatan yang masih harus diterima dan piutang lainnya berupa penjualan hasil pertanian, sewa tanah, gedung dan bangunan dan pendapatan anggaran lain-lain.

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Laporan Operasional, realisasi PNBP dirinci sebagai berikut:

I. Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional adalah Pendapatan Operasional dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dengan rincian akun 6 digit sebagai berikut:

Akun	Uraian	Nilai
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	69.487.600
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	27.776.224
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>98.263.824</b>

II. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional berasal dari :

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Akun	Uraian	Nilai
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.909.090
<b>Jumlah</b>		<b>3.909.090</b>

2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Akun	Uraian	LO
425991	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.500.000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	79.360.336
<b>Jumlah</b>		<b>83.860.336</b>

Selisih antara LO dengan LRA

425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	69.487.600	69.487.600	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	3.909.090	(3.909.090)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	27.776.224	27.776.224	-
425991	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4.500.000	(4.500.000)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	79.360.336	(79.360.336)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.000.000	-	1.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>98.263.824</b>	<b>185.033.250</b>	<b>87.769.426</b>

Adapun perbedaan antara Pendapatan pada LO dan Pendapatan pada LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

Akun	Uraian	Selisih	Penjelasan
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	Dicatat di LO dan LRA sama dan tidak terdapat selisih
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(3.909.090)	Dicatat di LO sebagai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berupa (hasil dari lelang)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(27.776.224)	Jurnal balik atas Pendapatan Diterima Dimuka dan piutang lainnya berupa sewa rumah dinas
425991	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(4.500.000)	Dicatat di LO sebagai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(79.360.336)	Dicatat di LO sebagai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	(1.000.000)	Dicatat di LO sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

## D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.188.388.284,00. dan Rp6.203.091.049,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.378.067.940,00	4.399.003.860,00	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	63.671,00	63.545,00	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	353.725.180,00	35.3918.240,00	0
Beban Tunj. Anak PNS	101.532.606,00	100.091.228,00	1
Beban Tunj. Fungsional PNS	359.542.200,00	363.184.000,00	-1
Beban Tunj. PPh PNS	18.305.761,00	18.359.042,00	0
Beban Tunj. Berasl PNS	257.960.040,00	258.829.080,00	0
Beban Uang Makan PNS	525.063.000,00	486.464.000,00	8
Beban Tunjangan Umum PNS	114.560.000,00	125.490.000,00	-9
Beban Gaji Pokok PPPK	36.601.200,00	98.614.000,00	-63
Beban Pembulatan Gaji PPPK	636,00	0,00	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.236.760,00	0,00	100
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.160.000,00	0,00	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.158.720,00	0,00	100
Beban Uang Makan PPPK	8.806.000,00	0,00	100
Beban Uang Lembur	29.040.000,00	98.614.000,00	-71
<b>Jumlah</b>	<b>6.188.388.284,00</b>	<b>6.203.091.049,00</b>	<b>0</b>

### Rincian Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

Belanja Pegawai				
Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
511111	Belanja Pegawai	6.188.388.284	6.187.354.484	1.033.800
	<b>Total</b>	<b>6.188.388.284</b>	<b>6.187.354.484</b>	<b>1.033.800</b>

Kode	Uraian	Total
51	Belanja Pegawai	6.187.354.484,00
1211	Beban Pegawai	6.188.388.284,00
<b>Perbedaan</b>		<b>1.033.800,00</b>

Selisih Belanja Pegawai dan Beban Pegawai sebesar Rp.-1.033.800,00,- dikarenakan adanya belanja yang masih harus dibayar berupa Belanja pegawai yang masih harus dibayar yaitu Belanja Gaji Pokok PNS an.Fitri Ratna asih dan Belanja Tunjangan Fungsional PNS an. Ani Murhartati Savitri

1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS Rp 266.600 disebabkan beban yg msih harus dibayar di Tahun 2024
2. 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS Rp. 767.200 disebabkan beban yg msih harus dibayar di 2024

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00,- dan Rp57.505.148,00,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	10.000.000,00	57.505.148,00	-83
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>57.505.148,00</b>	<b>-83</b>

Rincian Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

Belanja Persediaan				
Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
593111	Beban Persediaan Konsumsi	10.000.000	10.000.000	-
	<b>Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.170.380.109,00 dan Rp10.927.505.116,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.344.364.487,00	1.165.461.943	15
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	184.500,00	1.948.210	-91
Beban Honor Operasional Satuan kerja	217.032.000,00	214.332.000,00	1
Beban Barang Operasional Lainnya	56.850.800,00	54.322.700,00	5
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	324.597.972,00	-100
Beban Bahan	2.214.671.966,00	3.422.424.689,00	-35
Beban Honor Output Kegiatan	853.790.000,00	910.960.000,00	-6
Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.460.028.178,00	7.556.083.293,00	-1
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	0,00	184.800.000,00	-100
Beban Langganan Listrik	305.630.945,00	31.4982.644,00	-3
Beban Langganan Telepon	1.677.152,00	1.954.503,00	-14
Beban Langganan Air	1.332.000,00	1.219.000,00	9
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	228.000.000,00	200.999.000,00	13
Beban Sewa	328.926.626,00	248.450.601,00	32
Beban Jasa Profesi	291.390.000,00	481.000.000,00	-39
Beban Jasa Lainnya	234.164.975,00	365.835.000,00	-36
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	141.018.000,00	-100
<b>Jumla</b>	<b>13.516.699.872,00</b>	<b>15.587.084.555,00</b>	<b>-13</b>

## Perbandingan Beban Barang dan Jasa

Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.344.364.487	1.344.364.487	-
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	184.500	184.500	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	217.032.000	215.892.000	1.140.000
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(1.140.000)	-	(1.140.000)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	56.850.800	56.850.800	-
521211	Beban Bahan	2.214.671.966	2.214.671.966	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	853.790.000	853.790.000	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.460.028.178	7.449.102.421	10.925.757
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(10.925.757)	-	(10.925.757)
522111	Beban Langganan Listrik	305.630.945	303.258.094	2.372.851
522112	Beban Langganan Telepon	1.677.152	1.757.534	(80.382)
522113	Beban Langganan Air	1.332.000	1.332.000	-
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	228.000.000	228.000.000	-
522141	Beban Sewa	328.926.626	328.926.626	-
522151	Beban Jasa Profesi	291.390.000	282.112.000	9.278.000
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(9.278.000)	-	(9.278.000)
522191	Beban Jasa Lainnya	234.164.975	234.164.975	-
	<b>Total</b>	<b>13.516.699.872</b>	<b>13.514.407.403</b>	<b>2.292.469</b>

## Rincian Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Total
52	Belanja Barang dan Jasa	13.514.407.403,00
1211	Beban Barang dan Jasa	13.516.699.872,00
	<b>Perbedaan</b>	<b>-2.292.469,00</b>

Selisih disebabkan adanya :

Terdapat selisih terkait belanja dengan beban terkait akun :

- 522111 Belanja Langganan Listrik Rp. **2.372.851** di sebabkan listrik 2022 dibayarkan di Tahun 2023 Rp. 22.446.676 dan listrik 2023 dibayarkan di 2024 Rp. 24.819.527,00
- 522112 Belanja Langganan Telepon Rp. **-80.382** di sebabkan beban 2022 dibayarkan di Tahun 2023 Rp. 217.875 dan beban 2023 dibayarkan di 2024 Rp. 137.493,00

## D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.318.136.383,00 dan Rp1.481.356.287,00 Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	701.596.112,00	799.084.783,00	-12
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	616.540.271,00	567.934.754,00	9
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	84.979.350,00	-100
Beban Persediaan suku cadang	0,00	29.357.400,00	-100
<b>Jumlah</b>	<b>1.318.136.383,00</b>	<b>1.481.356.287,00</b>	<b>-11</b>

Penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas adalah bahwa pada tahun 2023 anggaran pemeliharaan menurun jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sbb:

- Adanya Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan
- Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Akun	Uraian	LRA	LO	Selisih
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703.759.078	701.596.112	2.162.966
523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(2.162.966)	-	(2.162.966)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	617.381.771	616.540.271	841.500
523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(841.500)	-	(841.500)
	<b>Total</b>	<b>1.318.136.383</b>	<b>1.318.136.383</b>	<b>-</b>

Rincian Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan

Kode	Uraian	Total
52	Belanja Pemeliharaan	1.318.136.383,00
1211	Beban Pemeliharaan	1.318.136.383,00
	<b>Perbedaan</b>	<b>0,00</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.577.859.804,00 dan Rp9.250.649.579,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3.117.440.301,00	6.431.949.579,00	-52
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	114.680.500,00	232.080.000,00	-51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.345.739.003,00	2.586.620.000,00	-9
<b>Jumlah</b>	<b>5.557.859.804,00</b>	<b>9.250.649.579,00</b>	<b>-40</b>

Penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas adalah bahwa untuk tahun 2023 beban perjalanan dinas meningkat jika dibandingkan tahun 2022.

Selisih di sebabkan adanya:

- Pengembalian Perjalanan Biasa dobel pengajuan untuk kegiatan OASE
- Pengembalian Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp.4.089.779,00 yaitu : perubahan uang saku kegiatan MBKM Rp.1.770.000, Perubahan pembayaran transport disesuaikan dgn AD Cost Paket Meetng Rp.2.179.778,- dan perubahan hari kehadiran karena peserta ada kegiatan lain Rp.140.000,-

Akun	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
524111	Beban Perjalanan Biasa	3.137.920.352	3.117.440.301	20.480.051
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(20.480.051)	-	(20.480.051)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	114.680.500	114.680.500	-
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.433.601.381	2.345.739.003	87.862.378
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(87.862.378)	-	(87.862.378)
	<b>Total</b>	<b>5.577.859.804</b>	<b>5.577.859.804</b>	<b>-</b>

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas

Kode	Uraian	Total
52	Belanja Perjalanan Dinas	5.577.859.804,00
1211	Beban Perjalanan Dinas	5.577.859.804,00
<b>Perbedaan</b>		<b>0,00</b>

**D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp750.000.000,00 dan Rp30.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	750.000.000,00	30.000.000,00	2400
<b>Jumlah</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>2400</b>

Untuk belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat terdapat 30 kelompok dengan bantuan per kelompok masing-masing Rp.25.000.000,00 dan sudah di input kedalam Aplikasi BAST Banpem.

**D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.435.821.281,00 dan Rp.1.658.585.153,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	603.875.942,00	603.875.941,00	0
Beban Penyusutan Irigasi	1.7155.846,00	17.155.846,00	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan Jaringan	2.932.822,00	2.932.822,00	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	811.856.671,00	1.034.620.544,00	-22
<b>Jumlah</b>	<b>1.435.821.281,00</b>	<b>1.658.585.153,00</b>	<b>-13</b>

**D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-9.360.336,00	5.211.330,00	1423
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.500,000,00	27,00	1656
<b>Jumlah</b>	<b>-83.860.336,00</b>	<b>-5.211.357,00</b>	<b>1509</b>

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yaitu :

- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.79.360.336,00 ( pengembalian perjalanan dinas dari kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2022).
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.4,500,000,0 ( pengembalian belanja pegawai an. Galuh HEA dari bulan Maret sd Desember 2022)

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.383.362.119.094,00 dan Rp1.384.795.990.975,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-26.610.872.374,00 dan Rp34.183.208.915,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.171.724.824,00 dan Rp32.749.337.034,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	27.357.758.074,00
Diterima dari Entitas Lain	-186.033.250,00
Transfer Masuk	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.171.724.824,00</b>

#### E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp0,00.

#### E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00,- dan Rp.0,00,-

#### E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.381.922.971.544,00 dan Rp1.383.362.119.094,00

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Pada Tanggal 02 Januari 2023 Polbangtan Yogyakarta melakukan Jurnal Balik yaitu Jurnal penyesuaian Akrual tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

No	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	RUPIAH
1	Jurnal Akrual Belanja Barang Langganan Listrik	522111	212112	-24.819.527
2	Jurnal Akrual Belanja Barang Langganan Telepon	522112	212112	-137.493
3	Jurnal Akrual Belanja Barang Langganan Air	522113	212112	-108.000
4	Jurnal Akrual Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	511111	212111	-266.600
5.	Jurnal Akrual Belanja Tunjangan Fungsional PNS	511124	212111	-767.200
	Jumlah Total			-26.098.820

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Untuk periode semester SEMSTER II TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED Polbangtan Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta telah melakukan revisi DIPA sebanyak 12 kali dengan rincian berikut:

**a. DIPA DAN POK AWAL**

Nomor dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2022

Tanggal : 30 November 2022

PAGU : Rp. 33.366.234.000

**b. DIPA REVISI 1**

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/20202

Tanggal : 31 Januari 2023

PAGU : Rp. 33.017.446.000

**c. DIPA REVISI 2**

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2022

Tanggal : 1 Maret 2023

PAGU : Rp. 33.017.446.000

**d. DIPA REVISI 3**

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2023

Tanggal : 9 Mei 2023  
PAGU : Rp. 32.442.646.000

**e. DIPA REVISI 4**

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2023  
Tanggal : 17 Juli 2023  
PAGU : 31.848.057.000

**f. DIPA REVISI 5**

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2023  
Tanggal : 31 Agustus 2023  
PAGU : 30.628.057.000

**g. DIPA REVISI 6**

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2023  
Tanggal : 11 September 2023  
PAGU : 30.628.057.000

**h. DIPA REVISI 7**

Nomor Dokumen : DIPA 018.10.2.417407/2023  
Tanggal : 21 September 2023  
PAGU : 30.668.588.000